

**PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN
ANGGARAN SEBAGAI PENGENDALIAN BIAYA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JAWA TENGAH**

Oleh:

Agnia Asih Ghaisani

B12.2013.02495

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Dian Nurwantoro Semarang
email: 212201302495@mhs.dinus.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban serta mengetahui efisiensi biaya yang telah dilakukan para bendahara untuk mengukur kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang membandingkan antara realisasi dan anggaran. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan Dinas Perhubungan. Metode Analisis yang digunakan metode variansi, dimana hasil yang diperoleh terdapat biaya yang sudah efektif dan belum efektif.

Kata kunci: akuntansi pertanggungjawaban, anggaran, pengendalian biaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide knowledge on the implementation of accounting and know the cost efficiency that has been done by the treasurer to measure employee performance. This research was conducted in the Central Java Provincial Transport Department. This study uses a qualitative method that compares the actual and budget. Sources of research data using secondary data, such as financial reports Transport Department. Methods of analysis used variance method, in which the results obtained are cost effective and have not been effective.

Keyword: responsibility accounting, budgeting, cost control

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di Pulau Jawa dengan Ibukota Semarang. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Sektor perhubungan dibentuk dengan harapan agar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai pembangunan dari kebutuhan masyarakat dalam bentuk pengendalian sarana dan prasarana transportasi umum dan komunikasi.

Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik memiliki peran dengan memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada pimpinan untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik.

Anggaran adalah sebagai alat yang digunakan dalam akuntansi pertanggungjawaban untuk dapat membandingkan laporan realisasi manajemen pusat pertanggungjawaban sehingga ada perbedaan jumlah realisasi dengan biaya anggaran menjadi selisih yang akan mencerminkan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul, Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Pengendalian Biaya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Tengah.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui efisiensi pengendalian biaya untuk mengukur kinerja pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Manajemen

Menurut Hasen dan Mowen (2009) akuntansi manajemen bertanggung jawab mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi.

Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut (Ikhsan dan Ishak, 2005).

Syarat – Syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Ada lima syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban (Mulyadi, 2010) pusat biaya yang memadai sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen
2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen.

3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya (*controllability*) biaya oleh manajemen tertentu dalam organisasi.
4. Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi.
5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab (*responsibility reporting*).

Pusat Pertanggungjawaban

Menurut Hasen dan Mowen (2009) pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*) merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Ada empat utama pusat pertanggung jawaban :

1. Pusat biaya (*cost center*): Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggungjawab hanya terhadap biaya.
2. Pusat pendapatan (*revenue center*): Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan.
3. Pusat laba (*profit center*): Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya.
4. Pusat investasi (*investment center*): Suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi.

Akuntansi pertanggungjawaban Pusat Biaya

Menurut Lubis (2010) pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau jasa .pusat biaya memiliki 2 jenis yaitu : Pusat Biaya Teknik/Pusat Biaya Standar dan Pusat Biaya Kebijakan.

Biaya Terkendali Dan Biaya Tidak Terkendali

Simamora (2012) menyatakan bahwa, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali adalah cara penting lainnya untuk cara pengklasifikasian biaya adalah berdasarkan pengaruh manajerial, yakni sejauh mana manager tertentu dapat mengendalikan suatu biaya.

Anggaran

Menurut ikhsan (2009) anggaran merupakan perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan keuangan. Anggaran merupakan alat bagi manajerial untuk menjamin perolehan tujuan organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional. Anggaran yang disusun dan digunakan dalam perusahaan mempunyai peranan penting terutama untuk perbaikan. Dengan ini anggaran yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memiliki program, strategi, sasaran serta tujuan yang telah disusun sebelumnya.
2. Menentukan wewenang dan tanggung jawab tiap pusat pertanggungjawaban.
3. Mengharuskan setiap pusat pertanggungjawaban untuk mengadakan koordinasi.
4. Sebagian dasar untuk menilai setiap kinerja pusat pertanggungjawaban.

Anggaran Berbasis Kinerja

Rahman (2013), Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran (*output*) dan hasil yang diharapkan (*outcome*) termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program yang diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Rahman (2013), Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara/daerah mencakup antara lain penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Dalam dokumen penyusunan anggaran berbasis kinerja yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta keterkaitan antara besaran anggaran dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan Tolok ukur untuk pusat biaya pada bagian produksi tidak terlalu sulit untuk ditentukan karena secara fisik hasil kerja dari bagian ini akan terlihat. Beberapa tolok ukur untuk prestasi biaya menurut Anthony dan Govindarajan (2008) :

1. Efektivitas,
2. Pencapaian produk,
3. Kualitas produk,
4. Efisiensi.

Penelitian Terdahulu

Sieyilia Aliu (2013) melakukan penelitian tentang Penerapan akuntansi pertanggung jawaban sebagai alat pengendalian biaya produksi dan penilaian kinerja dengan hasil Struktur organisasi, anggaran dan penggolongan biaya belum efektif, tidak dapat memisahkan biaya produksi oleh karena itu tidak dapat menilai jelas kinerja perusahaan.

Andre Mandak (2013) melakukan penelitian tentang Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai pengendalian biaya Dinas Perhubungan Manado dengan hasil Laporan pertanggungjawaban Dinas perhubungan Manado tahun 2011 mengalami pengimpangan yang menguntungkan dan telah cukup memadai.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 355-357 Semarang.

Prosedur Penelitian

Sebelum menentukan judul penelitian, penelitian melakukan observasi terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah untuk menemukan apa yang dapat diteliti pada pemerintahan tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumbernya langsung (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung terhadap staf keuangan DISHUBKOMINFO Jawa Tengah.
2. Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari staf keuangan DISHUBKOMINFO Jawa Tengah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi
Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi yang individu yang diteliti. Observasi dilakukan agar mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang efisien penerapan akuntansi pertanggungjawaban, peneliti akan melakukan penelitian langsung pada DISHUBKOMINFO.
2. Wawancara
Wawancara merupakan survey dengan menggunakan pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan data di DISHUBKOMINFO.
3. Studi kepustakaan
Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan. Serta untuk membekali diri dengan teori akuntansi pertanggungjawaban, syarat-syarat agar dapat diterapkan akuntansi pertanggungjawaban, penyusunan anggaran, penelitian kinerja, serta teori-teori lain.

Metode Analisis

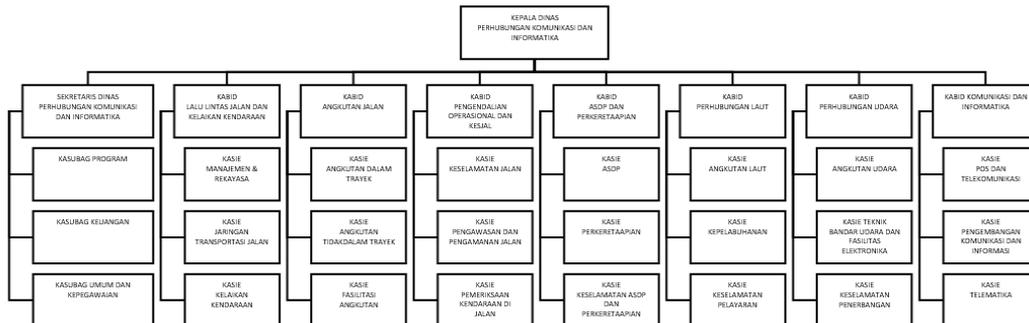
Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode dimana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Tumbuan, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah penulisan menjabarkan uraian mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian pusat biaya.

Struktur Organisasi



Penyusunan Anggaran

DISHUBKOMINFO Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan anggaran menggunakan konsep *bottom-up* atau partisipasi dimana penyusunan anggaran disiapkan oleh bidang-bidang yang melaksanakan anggaran tersebut, kemudian diajukan kepada pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk dikoreksi dan mendapatkan persetujuan.

Penggolongan Biaya

DINHUBKOMINFO Jawa Tengah telah melakukan pembagian biaya terkendali dan tidak terkendali sesuai dengan akuntansi pertanggungjawaban. Perlu adanya pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali pada setiap pusat pertanggungjawaban, untuk pelaporan biaya pada tiap pusat pertanggungjawaban karena tidak semua biaya dapat dikendalikan.

Karena setiap bidang mempertanggungjawabkan anggaran yang disusunnya, maka pelaporan pertanggungjawaban biaya bisa diketahui bagian mana yang harus dipertanggungjawabkan.

Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban

Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem pengumpulan biaya untuk pengendalian biaya yaitu dengan cara menggolongkan, mencatat, dan meringkas biaya – biaya dengan tingkat manajemen yang bertanggung jawab. Oleh karena itu biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen.

Sistem Pengendali Biaya dan Efisiensi Biaya

NO	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian	Ket
----	------------------	---------------	----------------	--------	-----

	1	2	3	4	5
	Biaya belanja langsung				
1	Biaya jasa surat menyurat	31,470,000.00	31,086,066.00	383,934.00	<i>Favorable</i>
2	Biaya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik	4,652,184,000.00	3,171,393,832.80	1,480,790,167.20	<i>Favorable</i>
3	Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	46,900,000.00	46,876,550.00	23,450.00	<i>Favorable</i>
4	Biaya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	350,000,000.00	138,600,000.00	211,400,000.00	<i>Favorable</i>
5	Biaya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	130,800,000.00	121,800,960.00	8,999,040.00	<i>Favorable</i>
6	Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor	410,000,000.00	406,474,000.00	3,526,000.00	<i>Favorable</i>
7	Biaya Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	1,535,004,000.00	1,534,850,499.60	153,500.40	<i>Favorable</i>
8	Biaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	60,600,000.00	60,557,580.00	42,420.00	<i>Favorable</i>
9	Biaya Penyediaan Makan Minum	265,575,000.00	265,495,327.50	79,672.50	<i>Favorable</i>
10	Biaya Jasa Pelayanan Perkantoran	1,727,685,000.00	1,452,637,548.00	275,047,452.00	<i>Favorable</i>
11	Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	934,650,000.00	860,438,790.00	74,211,210.00	<i>Favorable</i>
12	Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	11,910,000.00	11,800,428.00	109,572.00	<i>Favorable</i>

13	Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2,007,442,000.00	1,593,708,203.80	413,733,796.20	<i>Favorable</i>
14	Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	200,000,000.00	198,980,000.00	1,020,000.00	<i>Favorable</i>
15	Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga	823,150,000.00	763,142,365.00	60,007,635.00	<i>Favorable</i>
16	Biaya Pemeliharaan Arsip	59,137,000.00	50,065,384.20	9,071,615.80	<i>Favorable</i>
17	Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel	331,213,000.00	309,584,791.10	21,628,208.90	<i>Favorable</i>
18	Biaya Sarana Dan Prasarana Kantor Dinhubkominfo	1,677,407,000.00	1,500,272,820.80	177,134,179.20	<i>Favorable</i>
19	Biaya Rehab/Renovasi Gedung Kantor (Pemeliharaan Ponton/Kendaraan Diatas Air)	859,626,000.00	846,903,535.20	12,722,464.80	<i>Favorable</i>
20	Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	776,774,000.00	759,840,326.80	16,933,673.20	<i>Favorable</i>
21	Biaya Pengadaan Pakaian Olahraga	120,000,000.00	115,776,000.00	4,224,000.00	<i>Favorable</i>
22	Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	500,000,000.00	484,550,000.00	15,450,000.00	<i>Favorable</i>
23	Biaya Bintek Operator Jembatan Timbang	100,000,000.00	86,230,000.00	13,770,000.00	<i>Favorable</i>

24	Biaya Pelatihan Basic International Course (BFC)	150,000,000.00	132,795,000.00	17,205,000.00	<i>Favorable</i>
25	Biaya Bintek Kelaikan Dan Konstruksi Kapal	150,000,000.00	145,515,000.00	4,485,000.00	<i>Favorable</i>
26	Biaya Pemantauan Kinerja Aparatur Dinhubkominfo Prov. Jateng	50,000,000.00	48,255,000.00	1,745,000.00	<i>Favorable</i>
27	Biaya Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	150,000,000.00	134,550,000.00	15,450,000.00	<i>Favorable</i>
28	Biaya Penyusunan Dan Sosialisasi Produk Hukum Dinhubkominfo	150,000,000.00	114,660,000.00	35,340,000.00	<i>Favorable</i>
29	Biaya Fasilitasi Pengembangan Kerjasama MPU Bidang Hubkominfo	250,000,000.00	236,575,000.00	13,425,000.00	<i>Favorable</i>
	Total A	18,511,527,000.00	15,623,415,008.80	2,888,111,991.20	
	Baiay belanja tidak langsung				
1	Gaji Dan Tunjangan	25,684,751,000.00	23,976,715,058.50	1,708,035,941.50	<i>Favorable</i>
2	Tambahan Penghasilan	8,056,940,000.00	7,410,773,412.00	646,166,588.00	<i>Favorable</i>
	Total B	33,741,691,000.00	31,386,520,968.20	2,355,170,031.80	

– Biaya Belanja Langsung

Anggarannya sebesar Rp. **21,587,548,000.00**, realisasi yang terjadi sebesar Rp. **18,659,687,390.10** sehingga menghasilkan selisih variansi sebesar Rp. **2,927,860,609.90** maka dapat dikatakan efektif (*favorable*). Biaya Belanja Langsung yang terdapat pada anggaran dan realisasi diatas contohnya :

1. Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran sebesar Rp. **2,007,442,000.00**, realisasinya yang terjadi sebesar Rp. **1,593,708,203.80** sehingga menghasilkan selisih varian sebesar Rp. **413,733,796.20**

maka dapat dikatakan efektifitas (*favorable*). Hal ini dikarena pembiayaan yang berhubungan dengan Pemeliharaan Kendaraan tidak banyak. kerusakan kendaraan tidak banyak sehingga aktivitas yang berhubungan dengan Bengkel sangat minimal. Jadi realisasi yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah.

2. Biaya Penyediaan Makan Minum

Anggaran sebesar Rp. **265,575,000.00**, realisasi yang terjadi sebesar Rp. **265.495.327.50** sehingga menghasilkan selisih varian Rp. **79.672.50** maka dapat dikatakan efektif (*favorable*). Hal ini dikarena pembiayaan yang berhubungan dengan Makan dan Minuman tidak banyak. karyawan atau kepala dinas mengadakan rapat tidak banyak sehingga aktivitas yang berhubungan dengan snack dan minuman lebih sedikit. Jadi realisasi yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah.

– Biaya Belanja Tidak Langsung

Anggaran sebesar Rp. **33,741,691,000.00**, realisasi yang terjadi sebesar Rp. **31,386,520,968.20** sehingga menghasilkan selisih variansi sebesar Rp. **2,355,170,031.80** maka dapat dikatakan efektif (*favorable*). Biaya langsung yang terdapat pada anggaran dan realisasi diatas contohnya:

1. Gaji dan Tunjangan

Anggaran sebesar Rp. **25,684,751,000.00** realisasi yang terjadi sebesar Rp. **23,976,715,058.50** sehingga menghasilkan selisih variansi Rp. **1,708,035,941.50** maka dikatakan efektif (*favorable*). Hal ini dikarena pembiayaan yang berhubungan dengan Gaji dan Tunjangan tidak banyak. Adanya karyawan yang pensiun atau meninggal dunia sudah tidak termasuk dalam Anggaran gaji. Jadi realisasi yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah.

2. Tambahan Penghasilan

Anggaran sebesar Rp. **8,056,940,000.00** realisasi yang terjadi sebesar Rp. **7,410,773,412.00** sehingga menghasilkan selisih variansi Rp. **646,166,588.00** maka dikatakan efektif (*favorable*). Hal ini dikarena pembiayaan yang berhubungan dengan Tambahan Penghasilan tidak banyak. Adanya karyawan yang pensiun, meninggal dunia atau mengundurkan diri dari golongan tunjangan kinerja yang tinggi ke rendah. Jadi realisasi yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Penilaian Kinerja

Pemberian *Reward* atau *Punishment* dilakukan setelah adanya laporan ke Kepala Dinas dan diteruskan ke Gubernur atas anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang terjadi selama 1 periode di DINHUBKOMINFO Jawa Tengah sudah cukup baik. *Reward* atau *punishment* yang telah diberlakukan ini menunjukkan perhatian dan cara Pemerintah memotivasi agar kinerja karyawan dan sub bagian keuangan lebih baik serta semakin berkembang.

PENUTUP

Kesimpulan

DINHUBKOMINFO Jawa Tengah secara umum telah memenuhi kriteria dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi DINHUBKOMINFO Jawa Tengah sudah baik, secara jelas dan tegas menggambarkan pembagian tugas, tanggungjawab serta garis wewenang yang dilaksanakan oleh atasan sampai bawahan. Hal ini jelas terlihat pada saat proses penyusunan anggaran dinas, seluruh unit ikut berpartisipasi dengan metode *bottom-up*.
- b. Dalam penyusunan anggaran sudah menggunakan azas partisipasi, yaitu setiap bidang diberi kewenangan untuk menyusun anggaran masing-masing bidang.
- c. Dalam penyusunan anggaran hanya digolongkan dengan biaya belanja langsung dan biaya tidak langsung, Tidak ada pembagian yang secara jelas memisahkan antara biaya yang terkendali dan biaya yang tidak terkendali. Sebagai contoh biaya yang tidak terkendali yaitu biaya pemeliharaan mesin dan biaya yang dapat dikendalikan yaitu biaya ATK.
- d. Pada biaya belanja langsung dan tidak langsung masih terdapat beberapa biaya yang dapat dikatakan *Favorable* antara lain : Biaya Langsung adalah Biaya Pemeliharaan Kendaraan, Biaya Makan dan Minum, sedang Biaya Tidak Langsung adalah Gaji dan Tunjangan dan Penambahan Penghasilan. Untuk bagian yang *Favorable* dikarenakan adanya sedikit aktivitas karyawan dan kegiatan. Dari hal tersebut berdampak pada anggaran yang dikeluarkan sehingga realisasi lebih sedikit.
- e. Memberikan *reward* atau *punishment* pada sub bagian keuangan belum efektif karena hanya dilihat dalam 1 bulan dilaporkan ke Kepala Dinas dan diteruskan ke Gubernur. *Reward* berupa bonus gaji dan *Punishment* berupa teguran dan peringatan.

Saran

Saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepala Dinas adalah untuk lebih meningkatkan konsep akuntansi pertanggungjawaban dalam mengambil kebijakan pada masa yang akan datang, yaitu:

1. Untuk melakukan pengendalian biaya dan efisiensi biaya dengan lebih memperbanyak alokasi kegiatan untuk peningkatan kinerja DINHUBKOMINFO kepada masyarakat.
2. Serta memberikan hadiah bagi karyawan yang mampu mengendalikan dan mengefisienkan biaya yang telah dianggarkan.
3. Di perlukan alat yang mudah memantau realisasi kegiatan dan keuangan oleh Kepala Dinas dan Gubernur, sehingga apabila ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan bisa segera diantisipasi dan cepat mendapatkan solusinya.